

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2023

**Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
Serang**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Panadeglang, 31 Desember 2023

Rejojo, Kepala LPSPL Serang

Rejojo Budi Widiarto, S.Sos.,M.P

NIP. 19741002 200604 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	

C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pandeglang, 31 Desember 2023

Kepala LPSPL Serang



Santo Budi Widiarto, S.Sos.,M.P

NIP. 19741002 200604 1 001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.186.509.212 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.186.509.212 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.878.972.570 atau mencapai 0,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp0.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp46.573.579.181 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp185.132.625; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp46.388.446.556 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.591.996 dan Rp46.564.987.185

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.041.907.483 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp15.046.008.038 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-12.004.100.555, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp90.238.277 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-11.913.862.278.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp47.258.021.818, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-11.913.862.278 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -650.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 11.221.477.645 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp46.564.987.185

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

U R A I A N	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	3.186.509.212	-	2.790.983.162
JUMLAH PENDAPATAN		-	3.186.509.212	-	2.790.983.162
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	5.825.514.330	-	5.657.464.078
Belanja Barang	B.2.2	-	8.449.143.309	-	7.691.575.495
Belanja Modal	B.2.3	-	1.604.314.931	-	4.558.748.321
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		-	15.878.972.570	-	17.907.787.894

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	3.041.907.483	2.856.659.055
Jumlah Pendapatan		3.041.907.483	2.856.659.055
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	5.816.932.830	5.657.464.078
Beban Persediaan	D.4	45.314.056	54.893.941
Beban Barang dan Jasa	D.5	4.089.079.449	3.786.296.363
Beban Pemeliharaan	D.6	495.753.621	363.834.973
Beban Perjalanan Dinas	D.7	3.581.775.879	2.809.496.105
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	199.827.341	673.044.053
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	817.553.771	719.863.745
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	(228.909)	271.817
Jumlah Beban		15.046.008.038	14.065.165.075
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(12.004.100.555)	(11.208.506.020)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	33.000.000	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	57.238.277	3.991.650
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		90.238.277	3.991.650
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(11.913.862.278)	(11.204.514.370)
Pos Luar Biasa	D.15		
0		-	-
0		-	-
0		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(11.913.862.278)	(11.204.514.370)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	47.258.021.818	43.419.826.301
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(11.913.862.278)	(11.204.514.370)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(650.000)	(467.529.129)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(650.000)	(467.529.129)
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		(650.000)	(467.529.129)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	11.221.477.645	15.047.137.189
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(693.034.633)	3.375.093.690
EKUITAS AKHIR	E.6	46.564.987.185	46.794.919.991

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	8.581.500	54.363.452
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	(42.908)	(271.817)
Persediaan	C.4	1.971.900	4.415.000
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		185.132.625	196.193.302
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.21	36.930.718.000	36.930.718.000
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	6.205.708.157	6.360.114.226
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	8.233.338.475	8.140.317.475
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	517.299.000	517.299.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	150.365.000	150.365.000
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(5.648.982.076)	(5.025.492.592)
Jumlah Aset Tetap		46.388.446.556	47.073.321.109
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	138.360.000	178.920.000
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	(138.360.000)	(178.920.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		46.573.579.181	47.269.514.411
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	8.591.996	11.492.593
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8.591.996	11.492.593
JUMLAH KEWAJIBAN		8.591.996	11.492.593
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	46.564.987.185	47.258.021.818
JUMLAH EKUTAS		46.564.987.185	47.258.021.818
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		46.573.579.181	47.269.514.411

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.186.509.212	-
Jumlah Pendapatan	3.186.509.212	-
Belanja		
Belanja Pegawai	6.515.647.000	-
Belanja Barang	9.018.499.000	-
Belanja Modal	254.000.000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	15.788.146.000	-

Realisasi Pendapatan
Rp3.186.509.212

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.186.509.212 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.186.509.212. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hingga 31 Desember 2023 terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari PNBPN senilai Rp3.186.509.212, atau persentase 82% dari pagu PNBPN atau meningkat 14,17% dari Tahun Anggaran sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp33.000.000
 2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa pendapatan sewa mess pegawai senilai Rp11.654.050
 3. Pendapatan Perizinan Lainnya Rp1.281.420.000 dan
 4. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp1.748.833.433
 5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 2,069,677 yang berasal dari pengembalian tunjangan kinerja a.n. Fitriani Dwi Cahyo bulan September – Desember TA 2022.
 6. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 55.168.600 yang berasal dari Kelebihan realisasi belanja TA 2022 (biaya penginapan, biaya transportasi, biaya pembelian BBM, belanja langganan daya dan jasa lainnya atas pembayaran internet Rumah Negara Kepala LPSPL Serang) senilai Rp 2.732.200 dan TGR Belanja Sewa kendaraan TA 2022 senilai Rp52.436.400.
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 54.363.452 yang

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	3.186.509.212	-
Jumlah	-	3.186.509.212	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 14,17 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.186.509.212	2.790.983.162	14,17
Jumlah	3.186.509.212	2.790.983.162	14,17

Realisasi Penerimaan Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Tidak terdapat Realisasi Penerimaan Pajak hingga 31 Desember 2023

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp3.186.509.212

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp3.186.509.212 dan Rp2.790.983.162. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,17 dari TA 2022 Hingga 31 Desember 2023 terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari PNBPN senilai Rp3.186.509.212, atau persentase 82% dari pagu PNBPN atau meningkat 14,17% dari Tahun Anggaran sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp33.000.000
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa pendapatan sewa mess pegawai senilai Rp11.654.050
3. Pendapatan Perizinan Lainnya Rp1.281.420.000 dan
4. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp1.748.833.433
5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 2,069,677 yang berasal dari pengembalian tunjangan kinerja a.n. Fitriani Dwi Cahyo bulan September – Desember TA 2022.
6. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 55.168.600 yang berasal dari Kelebihan realisasi belanja TA 2022 (biaya penginapan, biaya transportasi, biaya pembelian BBM, belanja langganan daya dan jasa lainnya atas pembayaran internet Rumah Negara Kepala LPSPL Serang) senilai Rp 2.732.200 dan TGR Belanja Sewa kendaraan TA 2022 senilai Rp52.436.400.

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 54.363.452 yang merupakan temuan BPK TA 2022. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Pendapatan Perizinan Lainnya (kode 425259) merupakan kode untuk pungutan dokumen. Pungutan dokumen yang PNBPN-nya ditarik oleh UPT ada 2, yaitu rekomendasi dan SAJI DN. Saji DN sendiri ada 2, SAJI DN dan SAJI DN tentengan. Untuk rekomendasi, ada 2 jenis, yaitu rekomendasi DN dan rekomendasi LN. Untuk tarif dokumen rekomendasi DN dan LN adalah 540.000 namun apabila pelaku usaha masuk ke kategori UMK, maka tarif dokumen rekomendasi DN sebesar 135.000. Untuk SAJI DN, tarif pungutan dokumennya sebesar 540.000 sedangkan untuk SAJI DN tentengan tarif pungutan dokumennya sebesar 135.000. Sedangkap untuk kode akun 425629 merupakan tarif pungutan perdagangan. Untuk rekomendasi sendiri, perhitungan pungutan perdagangan dihitung dengan 1% x HPI x volume. HPI sudah diatur dalam Kepmen KP 85/2021.

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3.186.509.212	2.790.983.162	14,17
Jumlah	3.186.509.212	2.790.983.162	14,17

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	33.000.000	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.654.050	8.529.369	36,63
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun. Anggaran Yang Lalu		60.754.364	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun. Anggaran Yang Lalu	1.665.150		
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	66.387.958	163.842	-
Pendapatan Jasa Kelautan Lainnya	963.738.060	17.145.355	5.520,99
Pendapatan Jasa Perizinan Lainnya	1.112.535.000	27.000.000	4.020,50
Jumlah	2.149.849.168	108.873.561	1.874,63

*Realisasi Belanja
Rp15.878.972.570*

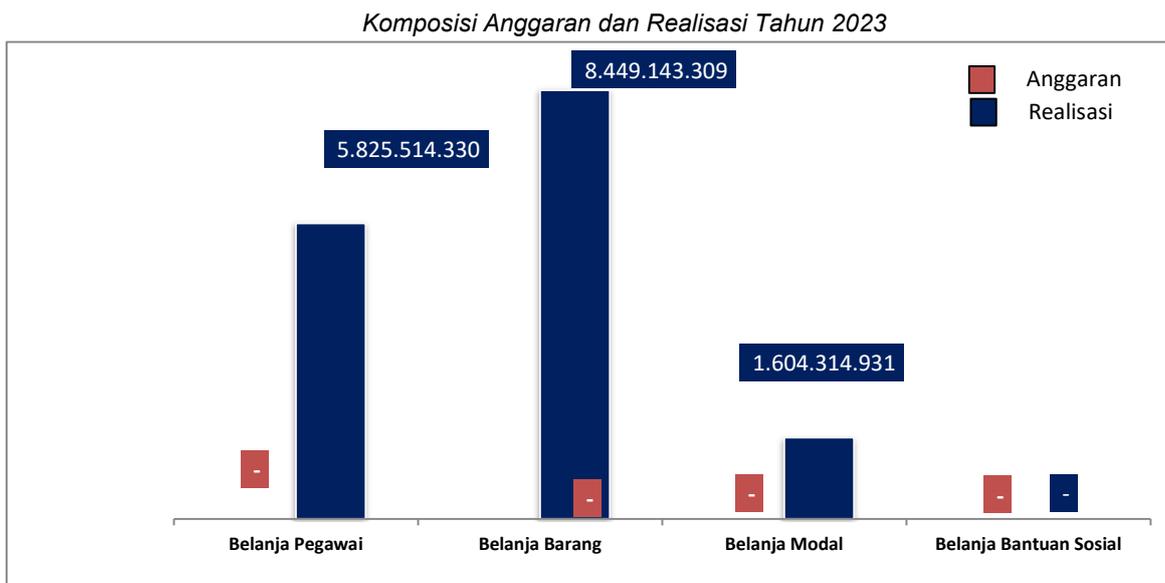
B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp15.878.972.570 atau 0,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.0 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	5.825.514.330	-
Belanja Barang	-	8.449.143.309	-
Belanja Modal	-	1.604.314.931	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	15.878.972.570	-

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 11,33% Terdapat penurunan realisasi belanja modal pada TA.2023 bila dibandingkan TA.2022 yang disebabkan oleh ada TA.2022 terdapat realisasi belanja modal berupa pembangunan gedung pelayanan DKI Jakarta.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	5.825.514.330	5.657.464.078	2,97
Belanja Barang	8.449.143.309	7.691.575.495	9,85
Belanja Modal	1.604.314.931	4.558.748.321	(64,81)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	15.878.972.570	17.907.787.894	(11,33)

Realisasi Belanja Pegawai
Rp5.825.514.330

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.825.514.330 dan Rp5.657.464.078. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,97 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan Terdapat kenaikan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 ini dibanding Tahun Sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan pangkat/golongan dan penambahan jumlah anggota keluarga pegawai yang menerima tunjangan. Terdapat pengembalian belanja pegawai senilai Rp4.040.812 berupa Pengembalian kelebihan bayar tukin bulan Februari a.n. Hendra Nurcahyo senilai Rp900.000. Selain itu juga terdapat pengembalian tukin a.n.Fitrian Dwi Cahyo bulan Januari - Juli TA 2023 senilai Rp3.140.200. Kemudian terdapat belanja pembulatan gaji senilai Rp612 pada TA 2023 ini. Berdasarkan temuan BPK tahun anggaran 2023 terdapat Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tugas belajar tahun 2023 senilai Rp.8.581.500,00 a.n.Yuli Deviyani Riadi, sehingga pada laporan keuangan audited 2023 ini terdapat perubahan berupa pengurangan pada beban gaji pokok PNS senilai Rp8.581.500.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.145.352.700	2.064.442.080	3,92
Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.983	45.429	(7,59)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	139.727.440	121.827.124	14,69
Belanja Tunj. Anak PNS	45.409.194	40.750.014	11,43
Belanja Tunj. Struktural PNS	14.400.000	14.400.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	172.220.000	168.840.000	2,00
Belanja Tunj. PPh PNS	669.750	207.650	222,54
Belanja Tunj. Beras PNS	130.211.160	123.765.780	5,21
Belanja Uang Makan PNS	273.825.000	327.122.000	(16,29)
Belanja Tunjangan Umum PNS	62.115.000	62.810.000	(1,11)
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.836.388.001	2.733.255.010	3,77
Jumlah Belanja kotor	5.829.555.142	5.657.465.087	3,04
Pengembalian Belanja Pegawai	4.040.812	1.009	400,377
Jumlah Belanja	5.825.514.330	5.657.464.078	2,97

Realisasi Belanja
Barang
Rp8.449.143.309

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.449.143.309 dan Rp7.691.575.495. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,85% dari Realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Terdapat penurunan belanja barang pada Tahun Anggaran 2023 dibandingkan Tahun Anggaran Sebelumnya dikarenakan peningkatan belanja perjalanan dinas dalam negeri karena sudah tidak ada pembatasan kegiatan di luar kantor

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	1.652.553.241	1.442.122.012	14,59
Belanja Barang Non Operasional	1.160.341.124	650.606.057	78,35
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	43.271.500	44.803.825	(3,42)
Belanja Jasa	1.321.417.116	1.694.301.170	(22,01)
Belanja Pemeliharaan	496.254.721	363.984.760	36,34
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.531.775.879	2.655.077.244	33,02
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	199.827.341	686.511.353	(70,89)
Jumlah Belanja Kotor	8.455.440.922	7.693.585.715	9,90
Pengembalian Belanja	6.297.613	2.010.220	213,28
Jumlah Belanja	8.449.143.309	7.691.575.495	9,85

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp55.000.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp43.970.000 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2023

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	55.000.000	43.970.000	79,95
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	55.000.000	43.970.000	79,95

Hingga 31 Desember 2023 , terdapat anggaran belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 berupa Belanja Barang Operasional (521131) dengan anggaran senilai Rp55.000.000 dan realisasinya senilai Rp43.970.000 (79,95%) berupa alat pelindung diri, obat-obatan, vitamin dan paket data pelayanan,

*Realisasi Belanja Modal
Rp1.604.314.931*

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.604.314.931 dan Rp4.558.748.321. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 64,81% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh Terdapat penurunan belanja modal pada Tahun Anggaran 2023 ini dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya karena tahun ini tidak ada belanja modal gedung dan bangunan seperti tahun 2022 dan masih terdapat pemblokiran anggaran pada DIPA satker untuk belanja modal. .

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.511.293.931	2.244.644.202	(32,67)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.021.000	2.319.343.119	(95,99)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.604.314.931	4.563.987.321	(64,85)
Pengembalian Belanja	-	5.239.000	(100,00)
Jumlah Belanja	1.604.314.931	4.558.748.321	(64,81)

*Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0*

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah hingga 31 Desember 2023

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp1.511.293.931

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.511.293.931 dan Rp2.244.644.202, mengalami penurunan sebesar 32,67 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh Terdapat penurunan belanja modal Tahun Anggaran 2022 ini dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya karena masih banyak akun belanja modal pada DIPA Satker yang di blokir. Belanja modal peralatan dan mesin berupa alat absensi sidik jari, gergaji mesin, alat pemotong rumput, alat pengolah data, GPS, WQC, Life Jacket, Printer dan kendaraan pendukung layanan PKKPRL..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.511.293.931	2.244.644.202	(32,67)
Jumlah Belanja Kotor	1.511.293.931	2.244.644.202	(32,67)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.511.293.931	2.244.644.202	(32,67)

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp93.021.000

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp93.021.000 dan Rp2.319.343.119 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 95,98% dibandingkan Realisasi TA 2022. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan namun terdapat belanja penambahan nilai gedung dan bangunan senilai Rp93.021.000..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	2.118.419.469	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	93.021.000	200.923.650	(53,70)
Jumlah Belanja Kotor	93.021.000	2.319.343.119	(95,99)
Pengembalian Belanja	-	5.239.000	(100,00)
Jumlah Belanja	93.021.000	2.314.104.119	(95,98)

Realisasi Belanja Modal,
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan hingga 31 Desember 2023

Realisasi Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat belanja modal lainnya hingga 31 Desember 2023

Realisasi Belanja
Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat belanja bantuan sosial hingga 31 Desember 2023

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Pada 31 Desember 2023 tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan hingga 31 Desember 2023

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat kas lainnya dan setara kas hingga 31 Desember 2023

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid)
Rp174.622.133

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Pada 31 Desember 2023 terdapat belanja dibayar dimuka berupa sewa kendaraan operasional sebanyak 5 unit senilai Rp61.138.800 dan sewa kantor wilker di Bangka Belitung, Lampung, Semarang dan Yogyakarta TA 2023 senilai Rp113.483.333.

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Tidak terdapat uang muka belanja hingga 31 Desember 2023

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang masih harus diterima hingga 31 Desember 2023

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Tidak terdapat piutang perpajakan hingga 31 Desember 2023

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Tidak terdapat Penyisihan piutang tidak tertagih - piutang perpajakan lainnya hingga 31 Desember 2023

Piutang Bukan Pajak
Rp8.581.500

C.9 Piutang Bukan Pajak

Pada 31 Desember 2023 terdapat Piutang Bukan Pajak berupa piutang lainnya (akun 115212) yang berasal dari hasil temuan atas pemeriksaan terpusat oleh BPK RI berupa Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tugas belajar tahun 2023 senilai Rp.8.581.500,00 a.n.Yuli Deviyani Riadi

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Lainnya	8.581.500	54.363.452
Jumlah	8.581.500	54.363.452

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp42.908

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Terdapat penyisihan piutang tak tertagih pada TA 2023 senilai Rp42.908 yang berasal dari 0,5% dari nilai piutang lainnya senilai Rp8.581.500. Piutang lainnya ini berasal dari hasil temuan BPK RI secara terpusat atas gaji dan tunjangan pegawai yang sedang tugas belajar di luar negeri, terdapat Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tugas belajar tahun 2023 senilai Rp.8.581.500,00 a.n.Yuli Deviyani Riadi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	8.581.500	0,5%	42.908
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	8.581.500		42.908

Persediaan
Rp1.971.900

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.971.900 dan Rp4.415.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	1.971.900	4.415.000
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses	-	-
Jumlah	1.971.900	4.415.000

Persediaan tersebut di atas dalam Terdapat persediaan hingga 31 Desember 2023 senilai

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.11 Persediaan yang Belum Diregister

Tidak terdapat persediaan yang belum diregister hingga 31 Desember 2023

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.12 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tidak terdapat piutang tagihan hingga 31 Desember 2023

Tanah Rp36.930.718.000

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp36.930.718.000 dan Rp36.930.718.000. Nilai Tanah tersebut Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat kenaikan aset tanah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	36.930.718.000
Mutasi tambah :	
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang :	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	36.930.718.000

Peralatan dan Mesin Rp6.205.708.157

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp6.205.708.157 dan Rp6.360.114.226. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	6.360.114.226
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.511.293.931
Perolehan Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	7.741.408.157
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(4.347.925.510)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	3.393.482.647

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

Hingga 31 Desember 2023 terdapat Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin senilai Rp1.511.293.931 berupa alat absensi sidik jari, gergaji mesin dan alat potong rumput, Drone, GPS, WQC, alat pengolah data, life jacket dan Kendaraan pendukung kegiatan PKKPR.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.15 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp8.233.338.475

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.233.338.475 dan Rp8.140.317.475. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	8.140.317.475
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	35.000.000
Pengembangan Melalui KDP	-
Pembelian	58.021.000
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2023	8.233.338.475
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(913.912.888)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	7.319.425.587

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.17 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp517.299.000

C.18 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.517.299.000 dan Rp.517.299.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	517.299.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	517.299.000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(387.143.678)
Nilai Buku per	130.155.322

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Tidak terdapat jalan, irigasi dan jaringan belum diregister hingga 31 Desember 2023

Aset Tetap Lainnya Rp150.365.000

C.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.150.365.000 dan Rp.150.365.000. Aset tetap tersebut Tidak terdapat kenaikan/penurunan aset tetap lainnya pada TA 2023. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	150.365.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2023	150.365.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	150.365.000

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.21 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.22 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Hingga 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp5.648.982.076

C.23 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp5.648.982.076 dan Rp5.025.492.592. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6.205.708.157	(4.347.925.510)	1.857.782.647
2	Gedung dan Bangunan	8.233.338.475	(913.912.888)	7.319.425.587
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	517.299.000	(387.143.678)	130.155.322
4	Aset Tetap Lainnya	150.365.000	-	150.365.000
	Akumulasi Penyusutan	15.106.710.632	(5.648.982.076)	9.457.728.556

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0

C.24 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Tidak terdapat kemitraan dengan pihak ketiga hingga 31 Desember 2023

Aset Tak Berwujud Rp0

C.25 Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat aset tak berwujud hingga 31 Desember 2023

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.26 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat aset tak berwujud dalam pengerjaan hingga 31 Desember 2023

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp0

C.27 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Tidak terdapat dana yang dibatasi penggunaannya hingga 31 Desember 2023

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0

C.28 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Tidak terdapat dana cadangan hingga 31 Desember 2023

Aset Lain-lain Rp138.360.000

C.29 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp138.360.000 dan Rp178.920.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	178.920.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	130.000.000
Saldo Awal	-
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	170.560.000
Saldo per 31 Desember 2023	138.360.000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	(138.360.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hingga 31 Desember 2023 terdapat mutasi tambah berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya senilai Rp130.000.000 dan penghapusan senilai Rp170.560.000

Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0

C.30 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 138.360.000

C.31 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp138.360.000 dan Rp178.920.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	138.360.000	(138.360.000)	-
-	-	-	-
Total	138.360.000	(138.360.000)	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp8.591.996

C.32 Utang kepada Pihak Ketiga

Terdapat utang kepada pihak ketiga hingga 31 Desember 2023 senilai Rp8.591.996 sedangkan pada 31 Desember 2022 senilai Rp11.492.593.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	8.591.996	11.492.593
Total	8.591.996	11.492.593

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Terdapat Utang kepada pihak ketiga pada TA 2023 yang terdiri dari beban langganan listrik, air dan daya jasa lainnya untuk penggunaan bulan Desember 2023 yang diterima tagihannya bulan Januari 2024.

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.33 Utang Yang Belum Ditagihkan

Tidak terdapat utang yang belum ditagihkan hingga 31 Desember 2023

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.34 Hibah Yang Belum Disahkan

Tidak terdapat hibah yang belum disahkan hingga 31 Desember 2023

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.35 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Tidak terdapat utang kelebihan pembayaran pendapatan hingga 31 Desember 2023

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.36 Uang Muka dari KPPN

Hingga 31 Desember 2023 sudah tidak terdapat uang muka dari KPPN karena sudah dilakukan penihilan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Pada 31 Desember 2023 terdapat tidak kas di bendahara pengeluaran berupa uang persediaan maupun Tambahan uang persediaan.

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.37 Utang Jangka Pendek Lainnya

Tidak terdapat utang jangka pendek lainnya hingga 31 Desember 2023

Ekuitas
Rp46.564.987.185

C.38 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp46.564.987.185. dan Rp47.258.021.818. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Tidak terdapat pendapatan perpajakan hingga 31 Desember 2023

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp3.041.907.483

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.041.907.483 dan Rp2.856.659.055. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 6,48. Hal tersebut disebabkan oleh Hingga 31 Desember 2023, berdasarkan Laporan Operasional terdapat rincian pendapatan negara bukan pajak TA 2023 senilai Rp3.041.907.483, atau meningkat 6,48% dari Tahun Anggaran sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa pendapatan sewa mess pegawai senilai Rp11.654.050
- Pendapatan Perizinan Lainnya Rp1.281.420.000 dan
- Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp1.748.833.433. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11.654.050	8.529.369,00	36,63
Pendapatan Jasa Lainnya	1.748.833.433	1.328.967.143,00	31,59
Pendapatan Perizinan Lainnya	1.281.420.000	1.449.495.000,00	(11,60)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	-	69.667.543,00	(100,00)
	-	-	-
Jumlah	3.041.907.483,00	2.856.659.055,00	6,48

Beban Pegawai
Rp5.816.932.830

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.816.932.830 dan Rp5.657.464.078.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 2,82 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Pada TA 2023 ini terjadi kenaikan Beban Pegawai yang disebabkan oleh penambahan anggota keluarga pegawai yang mendapatkan tunjangan dan terdapat penambahan pegawai PPPK. Berdasarkan temuan BPK tahun anggaran 2023 terdapat Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tugas belajar tahun 2023 senilai Rp.8.581.500,00 a.n.Yuli Deviyani Riadi, sehingga pada laporan keuangan audited 2023 ini terdapat perubahan berupa pengurangan pada beban gaji pokok PNS senilai Rp8.581.500.. Rincian Beban Pegawai Tahunan

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.136.771.200	2.064.442.080	3,50
Beban Pembulatan Gaji PNS	41.371	44.420	(6,86)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	139.727.440	121.827.124	14,69
Beban Tunj. Anak PNS	45.409.194	40.750.014	11,43
Beban Tunj. Struktural PNS	14.400.000	14.400.000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	172.220.000	168.840.000	2,00
Beban Tunj. PPh PNS	669.750	207.650	222,54
Beban Tunj. Beras PNS	130.211.160	123.765.780	5,21
Beban Uang Makan PNS	273.825.000	327.122.000	(16,29)
Beban Tunjangan Umum PNS	62.115.000	62.810.000	(1,11)
Beban Uang Lembur	-	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2.832.347.801	2.733.255.010	3,63
	-	-	-
Jumlah	5.816.932.830	5.657.464.078	2,82

*Beban Persediaan
Rp45.314.056*

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp45.314.056 dan Rp54.893.941

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17,45 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Persediaan Barang Konsumsi berupa alat tulis, penjepit kertas, alat tulis kantor lainnya, kertas HVS dan alat/bahan kegiatan kantor lainnya. . Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	45.314.056	54.844.591	(17,38)
Beban Persediaan Lainnya	-	49.350	(100,00)
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	45.314.056,00	54.893.941	(17,45)

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.089.079.449 dan Rp3.786.296.363.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Pada TA 2023 ini terdapat kenaikan beban barang dan jasa bila dibandingkan dengan TA 2022 sebesar 7,91%. Kenaikan ini berasal dari peningkatan jumlah personil PPNPN dan beban keperluan perkantoran berupa penambahan operasional kantor wilker Bangka Belitung dan Yogyakarta.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.241.098.768	1.054.746.727	17,67
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8.800.704	7.440.000	18,29
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	226.920.000	225.560.000	0,60
Beban Barang Operasional Lainnya	131.200.000	91.175.500	43,90
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	43.970.000	63.199.785	(30,43)
Beban Bahan	935.189.124	486.254.057	92,33
Beban Honor Output Kegiatan	225.152.000	164.252.000	37,08
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Beban Langganan Listrik	128.822.307	105.062.010	22,62
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Beban Langganan Air	35.274.700	22.335.093	57,93
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	61.023.696	57.274.540	6,55
Beban Jasa Konsultansi	-	-	-
Beban Sewa	768.133.750	889.803.332	(13,67)
Beban Jasa Profesi	133.500.000	74.460.000	79,29
Beban Jasa Lainnya	149.994.400	506.852.500	(70,41)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	30.696.619	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-	7.184.200	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	-
Jumlah	4.089.079.449	3.786.296.363,00	8,00

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp495.753.621 dan Rp363.834.973.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 36,26 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Pada TA 2023 ini terdapat peningkatan beban pemeliharaan dengan persentase sebesar 67,03% dibandingkan dengan TA 2021 yang disebabkan Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275.625.737	143.370.648	92,25
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	219.728.984	216.451.169	1,51
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	398.900	-	-
Jumlah	495.753.621	363.834.973	36,26

Beban Perjalanan Dinas
Rp3.581.775.879

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.581.775.879 dan Rp2.809.496.105

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 27,49 persen disebabkan oleh Terdapat peningkatan Beban Perjalanan Dinas pada Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 dikarenakan untuk perjalanan dinas sudah kembali normal dibandingkan tahun lalu.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	3.078.657.151	2.499.467.608	23,17
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	453.118.728	153.849.203	194,52
Jumlah	3.581.775.879,00	2.809.496.105	27,49

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp199.827.341

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Terdapat Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat berupa beban persediaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp199.827.341 hingga 31 Desember 2023

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 70,31 dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Bila dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, terjadi penurunan realisasi beban barang untuk diserahkan ke masyarakat sebesar 70,31%. Hingga 31 Desember 2023, terdapat realisasi belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp199.827.341 yang terdiri dari 2 lokasi yakni di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Banten. Untuk Provinsi D.I.Yogyakarta bantuan kepada Kelompok Penggiat Konservasi (KOMPAK) kepada Kelompok Konservasi Penyu Pantai Samas (KKPS) di Kabupaten Bantul berdasarkan BAST No.B.1965/LPSPL.2/PL.450/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 senilai Rp99.993.651 dan untuk Provinsi Banten bantuan diserahkan kepada Kelompok Harmoni Semenanjung Ujung kulon di Kabupaten Pandeglang berdasarkan BAST No. B.2664/LPSPL.2/PL.450/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 senilai Rp99.833.690.. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	195.433.341	673.044.053,00	(70,96)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	4.394.000	-	-
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	199.827.341,00	673.044.053	(70,31)

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial hingga 31 Desember 2023

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp817.553.771

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp817.553.771 dan Rp719.863.745.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	585.094.121	491.250.808	19,10
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	172.790.507	168.943.794	2,28
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	44.584.750	44.584.750	-
Beban Penyusutan Irigasi	14.849.143	14.849.143	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dig	-	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	235.250	235.250	-
Jumah Penyusutan	817.553.771	719.863.745	13,57
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	817.553.771	719.863.745	13,57

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp-228.909

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-228.909 dan Rp271.817

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(228.909)	271.817	(184,21)
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	(228.909,00)	271.817	(184)

Terdapat beban penyisihan piutang tak tertagih hingga 31 Desember 2023 senilai Rp271.817 berupa penyisihan piutang tak tertagih dari Temuan BPK RI tahun 2022 dan penyisihan piutang tak tertagih atas temuan BPK RI secara terpusat tahun 2023 senilai Rp42.908.

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp33.000.000

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Tidak terdapat Penjualan Aset Non Lancar hingga 31 Desember 2023

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat Penyelesaian kewajiban jangka panjang hingga 31 Desember 2023

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp57.238.277

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp57.238.277 dan Rp3.991.650.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.069.677	3.991.650,00	(48,15)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	55.168.600	-	-
Penerimaan Kembali Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	57.238.277,00	3.991.650	1.333,95

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat pos luar biasa hingga 31 Desember 2023

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	43.970.000	63.199.785	(30,43)
Jumlah	43.970.000,00	63.199.785	(30,43)

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Hingga 31 Desember 2023, terdapat anggaran belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 berupa Belanja Barang Operasional (521131) dengan anggaran senilai Rp 55.000.000 dan realisasinya senilai Rp 43.970.000 (79,95%) berupa alat pelindung diri, obat-obatan dan vitamin.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp47.258.021.818,00*

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.47.258.021.818,00 dan Rp.43.419.826.301,00

*Defisit LO Rp.-
11.913.862.278,00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.-11.913.862.278,00 dan Rp.-11.204.514.370,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Terdapat perubahan nilai surplus (Defisit) LO pada saat Unaudited dan Audited. Nilai surplus (Defisit) LO pada saat Unaudited senilai Rp.-11.922.400.870 menjadi Rp.-11.913.862.278 setelah Audited. Perubahan tersebut berasal dari temuan BPK RI secara terpusat berupa Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tugas belajar tahun 2023 senilai Rp.8.581.500,00 a.n.Yuli Deviyani Riadi

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.-650.000 dan Rp.-467.529.129 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Tidak Terdapat Koreksi Atas Reklasifikasi hingga 31 Desember 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Tidak terdapat selisih revaluasi aset hingga 31 Desember 2023

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp-650.000

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Hingga 31 Desember 2023 terdapat koreksi Aset Non Revaluasi senilai Rp650.000 berupa selisih yang ditimbulkan dari koreksi aset tetap.

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
-	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp11.221.477.645

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.11.221.477.645 dan Rp.15.047.137.189. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.878.972.570
Diterima dari Entitas Lain	(3.186.509.212)
Jumlah	11.221.477.645

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp 15.878.972.570, sedangkan DDEL sebesar Rp 3.186.509.212

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Terdapat transfer keluar hingga 31 Desember 2023 senilai Rp841,285,713 berupa kendaraan supervisi lapangan senilai Rp906.000.000 dikurangi nilai penyusutan senilai Rp64.714.287

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Tidak terdapat Pengesahan hibah langsung hingga 31 Desember 2023

Ekuitas Akhir
Rp46.564.987.185

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yakni Rp46.564.987.185 dan Rp47.258.021.818. Terdapat perubahan nilai Ekuitas Akhir pada saat Unaudited dan Audited. Nilai Ekuitas Akhir pada saat Unaudited senilai Rp.46.556.448.593 menjadi Rp46.564.987.185 setelah Audited. Perubahan tersebut berasal dari temuan BPK RI secara terpusat berupa Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tugas belajar tahun 2023 senilai Rp.8.581.500,00 a.n.Yuli Deviyani Riadi

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah dinyatakan berakhir oleh pemerintah sehingga kegiatan di luar kantor berjalan normal, terlihat dari belanja perjalanan dinas yang meningkat dari tahun sebelumnya. Namun pada DIPA Satker masih banyak terdapat anggaran yang masih diblokir yakni senilai Rp375.000.000.

D.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. *Piutang lainnya*

Berdasarkan temuan BPK RI secara terpusat atas gaji dan tunjangan pegawai yang sedang tugas belajar di luar negeri, terdapat Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tugas belajar tahun 2023 senilai Rp.8.581.500,00 a.n.Yuli Deviyani Riadi. Atas temuan ini maka ditindaklanjuti dengan membuat jurnal koreksi piutang lainnya (115212) terhadap beban gaji pokok PNS (511111) senilai Rp8.581.500 dan jurnal beban penyisihan piutang tak tertagih – piutang lainnya (594212) terhadap penyisihan piutang tak tertagih – piutang lainnya (116212) senilai Rp42.908

2. *Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu*

Terdapat penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp2.069.677 berupa pengembalian tunjangan kinerja atas nama Fitriani Dwi Cahyo bulan September – Desember 2022.

3. *Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu*

Terdapat penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu senilai Rp55.168.600 berupa Kelebihan realisasi belanja TA 2022 (biaya penginapan, biaya transportasi, biaya pembelian BBM, belanja langganan daya dan jasa lainnya atas pembayaran internet Rumah Negara Kepala LPSPL Serang) senilai Rp2.732.200 dan TGR Belanja Sewa senilai Rp52.436.400.

4. *Penerimaan Kembali Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran Yang Lalu*

Menindaklanjuti hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan LPSPL Serang TA 2022 di Muara Baru, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta kepada PT. Triharja Jasa Utama, sebagai Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Pelayanan LPSPL Serang di DKI Jakarta untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 54.363.452 untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Negara dengan data sebagai berikut:

Kode Billing	:	820230405661056
Nominal	:	Rp 10.000.000
Akun	:	425913
Tanggal bayar	:	5 April 2023

Kode Billing	:	820230427391707
Nominal	:	Rp 30.448.000
Akun	:	425913
Tanggal bayar	:	27 April 2023

Kode Billing	:	820230428499596
Nominal	:	Rp 13.915.452
Akun	:	425913
Tanggal bayar	:	28 April 2023

5. *Beban penyisihan piutang lainnya*

Hingga 31 Desember 2023 terdapat beban penyisihan piutang lainnya, yang berasal dari piutang lainnya (temuan BPK) senilai Rp54.363.452, kemudian penyisihan piutang tak tertagihnya sebesar 0,5% (kualitas piutang lancar) senilai Rp217.817. Penyisihan piutang tak tertagih ini sudah di jurnal balik

pada Semester I sehingga membentuk beban penyisihan piutang lainnya senilai Rp217.817 di kredit.

6. Pengembalian Belanja Pegawai

Hingga 31 Desember 2023, terdapat pengembalian belanja pegawai senilai Rp4.040.748 yang terdiri dari pembulatan gaji Rp621 dan Pengembalian kelebihan bayar tukin bulan Januari-Desember a.n. Fitriani Dwi Cahyo senilai Rp4.040.200.

7. Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran

Hingga 31 Desember 2023, terdapat pengembalian belanja Keperluan Perkantoran senilai Rp 563.769 berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada LPSPL Serang Nomor : T.412 /ITJ.3/HP.110/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

8. Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Hingga 31 Desember 2023, terdapat Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Rp 1.644 berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada LPSPL Serang Nomor : T.412 /ITJ.3/HP.110/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

9. Pengembalian Belanja Langganan Listrik

Hingga 31 Desember 2023, terdapat Pengembalian Belanja Langganan Listrik senilai Rp 36.500 berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada LPSPL Serang Nomor : T.412 /ITJ.3/HP.110/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

10. Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

Hingga 31 Desember 2023, terdapat Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya senilai Rp 2.426.200 berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada LPSPL Serang Nomor : T.412 /ITJ.3/HP.110/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.

11. Pengembalian Belanja Sewa

Hingga 31 Desember 2023, terdapat Pengembalian Belanja Sewa senilai Rp 2.369.500 berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada LPSPL Serang Nomor : T.412 /ITJ.3/HP.110/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023

12. Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Hingga 31 Desember 2023, terdapat Pengembalian Belanja Peralatan dan Mesin senilai Rp 900.000 berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022-2023 pada LPSPL Serang Nomor : T.412 /ITJ.3/HP.110/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023

13. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Hingga 31 Desember 2023 terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari PNBP senilai Rp3.186.509.212, atau meningkat 14,17% dari Tahun Anggaran sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin senilai Rp33.000.000
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa pendapatan sewa mess pegawai senilai Rp11.654.050
- Pendapatan Perizinan Lainnya Rp1.281.420.000 dan
- Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp1.748.833.433
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 2,069,677 yang berasal dari pengembalian tunjangan kinerja a.n. Fitriani Dwi Cahyo bulan September – Desember TA 2022.

- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 55.168.600 yang berasal dari Kelebihan realisasi belanja TA 2022 (biaya penginapan, biaya transportasi, biaya pembelian BBM, belanja langganan daya dan jasa lainnya atas pembayaran internet Rumah Negara Kepala LPSPL Serang) senilai Rp 2.732.200 dan TGR Belanja Sewa kendaraan TA 2022 senilai Rp52.436.400.
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp 54.363.452 yang merupakan temuan BPK TA 2022

14. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Hingga 31 Desember 2023 terdapat koreksi Aset Non Revaluasi senilai Rp650.000 berupa selisih yang ditimbulkan dari koreksi aset tetap.

15. Sewa Rumah Negara

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Tarif PNBP Rumah Negara Nomor B.2733/LPSPL.2/HP.360/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 tanggal terdapat 2 NUP Rumah Negara Golongan II Tipe B.

No.	Nama	Lb	Hs	Ns	Fkb	Fk	Sb
1	Rumah Negara Gol. II Tipe B NUP 1	186 m2	Rp. 6.480.000,-	60%	50%	5%	Rp. 497.178,-
2	Rumah Negara Gol. II Tipe B NUP 2	193 m2	Rp. 6.480.000,-	60%	50%	5%	Rp. 515.889,-

Keterangan:

$$Sb = 2,75 \% \times ((Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb \times Fk)$$

Sb : Sewa bangunan perbulan

Ns : Nilai sisa bangunan/layak huni (60%)

Lb : Luas bangunan dalam meter persegi

Fkb : Faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (50%)

Hs : Harga Satuan Bangunan per-meter persegi

Fk : Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%)

16. Belanja 526

Pada tahun 2023 ini terdapat belanja yang diserahkan ke Masyarakat/Pemda yang terdiri dari 2 BAST/Kelompok yakni Kelompok Harmoni Semenanjung Ujung Kulon dan Kelompok Konservasi Penyau Pantai SAMAS dimana bantuan yang diberikan terdiri dari akun peralatan dan mesin dan persediaan lainnya.

17. Belanja dalam rangka penanganan dampak Covid-19

Hingga 31 Desember 2023, terdapat anggaran belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 berupa Belanja Barang Operasional (521131) dengan anggaran senilai Rp 55.000.000 dan realisasinya senilai Rp 43.970.000 (79,95%) berupa alat pelindung diri, penambah daya tahan tubuh dan obat-obatan

Rincian realisasi akun dalam rangka penanganan Covid-19 hingga 31 Desember 2023

No.	Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Output	Keterangan
1.	521131	55.000.000	43.970.000	79,95	Masker, Handsanitizer, Desinfektan, obat-obatan dan vitamin.	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19

18. Matriks Revisi Satuan Kerja Loka PSPL Serang T.A 2023

No	Revisi Ke	Revisi Oleh	Tanggal	Digital Stamp	Pagu	Keterangan
1	Pagu Awal	DJA	17 Nov 2022	0301 0428 0017 9892	15.788.146.000	Pagu Defenitif

2	Revisi ke-01	DJA	26 Des 2022	0301 0428 0017 9892	15.788.146.000	Revisi penyesuaian nilai pagu blokir
3	Revisi ke-02	Kanwil	09 Feb 2023	0301 0428 0017 9892	15.788.146.000	Revisi penyesuaian Halaman III DIPA TW I
4	Revisi ke-03	KPA	28 Mar 2023	0301 0428 0017 9892	15.788.146.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
5	Revisi ke-04	Kanwil	05 Apr 2023	0301 0428 0017 9892	15.788.146.000	Revisi penyesuaian Halaman III DIPA TW II
6	Revisi ke-05	KPA	29 Mei 2023	0301 0428 0017 9892	15.788.146.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
7	Revisi ke-06	KPA	13 Jun 2023	0301 0428 0017 9892	15.788.146.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
8	Revisi ke-07	Kanwil	12 Juli 2023	0301 0428 0017 9892	15.788.146.000	Revisi penyesuaian Halaman III DIPA TW III
9	Revisi ke-08	DJA	30 Agustus 2023	8323 2290 7280 0319	19.516.466.000	Revisi anggaran penambahan anggaran penggunaan PNBP
10	Revisi ke-09	Kanwil	21 September 2023	8323 2290 7280 0319	19.516.466.000	Usulan Revisi Anggaran dan Pemutakhiran halaman III DIPA TW III
11	Revisi ke-10	DJA	19 Oktober 2023	9481 1051 6094 0801	16.766.466.000	Usulan Revisi Anggaran Pembukaan Blokir Anggaran Non Automatic Adjustment (AA) dan Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir AA
12	Revisi ke-11	KPA	24 Oktober 2023	9481 1051 6094 0801	16.766.466.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan
13	Revisi ke-12	Dit.PA	9 November 2023	1504 2312 9030 0038	16.666.466.000	Usulan revisi anggaran pemindahan belanja pegawai (001) ke Operasional Perkantoran (002)
14	Revisi ke-13	Kanwil	16 November 2023	1504 2312 9030 0038	16.666.466.000	Usulan Revisi Anggaran dan Pemutakhiran halaman III DIPA TW IV
15	Revisi ke-14	Kanwil	30 November 2023	1504 2312 9030 0038	16.666.466.000	Usulan Revisi Anggaran dan Pemutakhiran halaman III DIPA TW IV
16	Revisi ke-15	KPA	27 Desember 2023	1504 2312 9030 0038	16.666.466.000	Permintaan Pemuktahiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan